

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam perusahaan yang sudah *go public* di Indonesia tentunya, pihak perusahaan harus memperhatikan bagaimana menjaga dan membuat suatu laporan keuangan yang berkualitas. karena laporan keuangan berperan penting sebagai alat komunikasi yang memuat informasi penting bagi para pembuat keputusan ekonomi (Merlina Toding, 2013: 15-31). yang terdiri atas perubahan unsur-unsur laporan keuntungan kepada pihak berkepentingan dalam memberikan suatu penilaian kinerja keuangan terhadap perusahaan dan pihak manajemen perusahaan (Fahmi, 2011:28). sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. (Raharjaputra, 2011:194).

Menurut Thomas Sumarson (2017:66) laporan keuangan merupakan kewajiban setiap perusahaan untuk membuat dan melaporkannya pada suatu periode tertentu. Apa yang dilaporkan dianalisis, sehingga dapat diketahui kondisi dan posisi perusahaan terkini. Dengan demikian akan diketahui letak kelemahan dan kekuatan perusahaan. Di samping itu, juga untuk memanfaatkan peluang yang ada dan menghadapi atau menghindari ancaman yang mungkin timbul sekarang dan di masa yang akan datang. Bastian (2010:96) mengemukakan laporan keuangan merupakan laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif serta mempresentasikan posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang di lakukan oleh suatu entitas. Entitas

pelaporan sendiri merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Kesimpulan dari laporan keuangan menurut Sofyan Syarif Harahap (2013:105) secara konseptual Laporan Keuangan merupakan gambaran dari suatu kondisi keuangan dan hasil suatu usaha perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah: neraca, atau laporan laba/rugi, atau hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan.

Tujuan laporan keuangan menurut PSAK 1 (Revisi 2009) yang dikutip Dwi Martini *et.,al* (2016:9) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi, laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Menurut Thomas Sumarson (2017:36) Laporan keuangan dapat disusun secara mendadak untuk kebutuhan perusahaan maupun secara berkala (rutin) yang mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

Untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas, perusahaan atau entitas harus memperhatikan karakteristik dari laporan keuangan. Kualitas diartikan

sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan (Iman Mulyana 2010:96). Dalam suatu kualitas laporan keuangan, bisa di simpulkan bahwa kualitas tersebut dilihat dari informasi kuantitatif yang lengkap dan transparan, dirancang tidak menyesatkan kepada pengguna, sehingga dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya (Jonas, G. J dan J. Blanchet, 2000 : 353-363). Agar informasi tersebut berguna bagi pemakai informasi, maka harus memenuhi karakteristik kualitatif, supaya informasi kuantitatif dalam laporan keuangan dapat memenuhi kebutuhan pemakai (Dwi Martini, *et., al* 2016:36).

Menurut Ely Suhayati, Sri Dewi Anggadini (2014:16) karakteristik laporan keuangan diantaranya: relevan (disajikan tepat waktu dan lengkap), andal (menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi), dapat dibandingkan (dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau L/K entitas pelaporan lain pada umumnya), dan dapat dipahami (Kualitas informasi yang ditampung dalam laporan keuangan mudah dipahami oleh pemakai).

Di Indonesia kondisi laporan keuangan yang belum berkualitas masih ditemukan di beberapa perusahaan atau entitas, tentunya permasalahannya terletak pada kualitas laporan keuangan tersebut yang dinilai masih belum cukup baik. Fenomena yang terjadi dalam hal tersebut salah satunya adanya laporan keuangan yang tidak relevan dan tidak dapat dibandingkan. Menurut ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara tahun 2018, BPK menyematkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer atas laporan keuangan tahun 2017 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Berdasar hasil Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2018, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) disajikan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Selain itu, ada akun-akun yang tidak didukung dengan bukti yang cukup, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tidak berkualitas.

Selanjutnya adanya laporan keuangan yang tidak andal dan tidak dapat dipahami. Menurut Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Rokhmad Sunanto tahun 2018 mengemukakan Permasalahan yang terjadi dalam laporan keuangan yang telah di ungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mengungkap kasus tindak pidana perbankan yang dilakukan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Multi Artha Mas Sejahtera (MAMS) berinisial H dengan total kerugian sebanyak Rp6,28 miliar. Kasus bermula ketika OJK melakukan pengawasan terhadap kegiatan BPR MAMS di Bekasi pada 2013.H melakukan pencatatan palsu dalam proses laporan keuangan perusahaan. Maka, hal tersebut mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan menjadi tidak berkualitas dikarenakan laporan yang disajikan tidak sesuai dengan fakta, sehingga informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan tersebut tidak dapat dipahami oleh para pengguna.

Selanjutnya terdapat fenomena yang terjadi pada PT Kereta Indonesia (persero) kota Bandung Pada Juli 2019 Menurut Vicky Winda Junior Manager, menyatakan Kasus PT. KAI berada pada perbedaan pandangan antara Manajemen dan Komisaris, khususnya Komisaris yang merangkap sebagai Ketua Komite Audit

dimana Komisaris tersebut menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal.

Dan Komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Dikarenakan telah terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT. Kereta Api Indonesia (persero) kota Bandung. Dapat disimpulkan bahwa pihak perusahaan masih belum mencapai beberapa aspek untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas salah satu aspek belum tercapai dengan baik yaitu dari keandalan dan relevannya suatu laporan keuangan. Karena laporan keuangan yang di hasilkan oleh pihak perusahaan tidak disajikan secara jujur dan tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada.

Salah satu faktor lain dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah *Good Corporate Governance*. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* membantu perusahaan untuk mengelola serta mengendalikan perusahaan untuk mencapai tujuan dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Sukrisno Agoes, 2011:78).

Menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008:36) *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem (input, proses,output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Sedangkan menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:24) *Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikan

nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan dan masyarakat sekitar.

Kesimpulan dari *Good Corporate Governance* adalah Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Adrian Sutedi, 2011:1)

Tujuan dari penerapan *Good Corporate Governance* menurut Sutojo dan Aldridge (2005:5-6) adalah untuk melindungi hak dan kepentingan pemegang saham, melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* non pemegang saham, meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham, meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan, meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan. Untuk menjaga perusahaan agar berjalan dengan baik maka pihak perusahaan harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Good Corporate Governance*.

Menurut Adrian Sutedi (2012:4) prinsip tersebut disingkat dengan tarif yaitu: *transparency* (Penyediaan informasi yang terbuka, memadai, akurat, dan tepat waktu), *accountability* (dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar), *responsibility* (mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan), *independency* (di

kelola secara independen sehingga masing-masing orang perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain), *fairness* (memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya).

Fenomena terkait *Good Corporate Governance* yaitu kasus yang terjadi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti terungkapnya PT Jasa Marga Tbk mengabaikan *Good Corporate Governance*. Investor mempertanyakan kualitas tata kelola perusahaan atau (*good corporate governance/GCG*) PT Jasa Marga Tbk (JSMR). Sebab, perusahaan milik negara ini membiarkan salah seorang manajernya melakukan gratifikasi berupa motor gede (moge) Harley-Davidson kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pakar hukum Universitas Airlangga Surabaya, I Wayan Titib Sulaksana tahun 2017 mengungkapkan PT Jasa Marga Tbk (JSMR) memang telah mengabaikan prinsip *good corporate governance*. Sebab, kalau benar-benar dijalankan, tidak perlu gratifikasi. Kalau GCG dijalankan, pasti PT Jasa Marga Tbk (JSMR) sehat secara manajemen. Artinya, manajemen tidak takut diaudit oleh pihak mana pun. Menurut Analis Binaartha Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama tahun 2017, adanya suap yang dilakukan Jasa Marga otomatis menjadi sentimen negatif bagi pelaku pasar. “Hal ini mengindikasikan etika buruk dari perusahaan itu sendiri. Berdasarkan fenomena tersebut, *good corporate governance* pada PT Jasa Marga Tbk (JSMR) tersebut dinilai belum maksimal dan belum memenuhi indikator dari *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responabilitas, dan independensi dikarenakan terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

Selanjutnya terdapat fenomena yang terjadi pada PT Kereta Indonesia (persero) kota Bandung Pada Juli 2019 Menurut Vicky Winda Junior Manager, menyatakan bahwa penerapan proses *good corporate governance* belum dipahami dan diterapkan sepenuhnya sehingga masih ada penyelewengan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, yang menjadi salah satu pokok permasalahannya ialah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak tersebut tidak transparansi atau tidak terbuka.

Penelitian yang dilakukan oleh Hana Maryana, *et.,al* (2018:706) mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan, jika prinsip-prinsip *good corporate governance* diterapkan dengan baik maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangannya.

Selain *good corporate governance*, sistem pengendalian internal merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas, sistem pengendalian internal, Merupakan suatu perencanaan organisasi dan semua tindakan yang terkait yang diterapkan oleh suatu entitas untuk menjaga aktiva, mendorong para karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan, meningkatkan efesiensi organisasi dan memastikan keandalan pencatatan akuntansi (Horngren, *et. all*, 2005 : 372).

Menurut Menurut I Gusti Agung Rai (2008:283) definisi sistem pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan

yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan menurut Marshall B. Romney & Paul John Steinbar (2011: 229) sistem pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga *asset*, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan, dan merupakan suatu rangkaian dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang terciptakan untuk memberikan jaminan yang memadai untuk tercapainya organisasi.

Kesimpulan sistem pengendalian internal menurut Menurut Arens *et.,al* (2008:370) adalah sebagai kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedurnya ini sering disebut pengendalian dan secara kolektif membentuk sistem pengendalian entitas tersebut.

Tujuan sistem pengendalian internal menurut Mulyadi (2016:130) tujuan tersebut diantaranya: menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Komponen sistem pengendalian internal menurut Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu (2010:223) adalah Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Penilaian Risiko (*Risk Assesment*), Aktivitas Pengendalian (*Control Activity*), Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*), Pemantauan (*Menthoring*)”.

Fenomena yang terjadi dalam sistem pengendalian intern. Menurut Agung Firman Sampurna tahun selaku Anggota BPK I berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) tahun 2016, terjadi pada 15 entitas pemeriksaan di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) I. 15 entitas tersebut adalah Kemenko Polhukam, Lembaga Sandi Negara, BIN, Lemhannas, Wantannas, BNPT, Bakamla, Komnas HAM, KPK, BNN, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, BMKG, dan Basarnas. Kelemahan sistem pengendalian internal tersebut di antaranya penerapan basis akrual belum memadai, penetapan status aset tetap belum tuntas, penatausahaan persediaan belum memadai, pemanfaatan barang milik negara belum sesuai ketentuan, lemahnya pengelolaan kas, penatausahaan piutang paten kurang memadai, serta pencatatan dan pelaporan hibah tidak memadai.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis dapat menyimpulkan sistem pengendalian intern pada 15 entitas di lingkungan pemerintah tersebut belum maksimal dan belum memenuhi indikator sistem pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian dan pemantauan, belum memenuhi indikator lingkungan pengendalian karena pemanfaatan barang milik negara belum sesuai ketentuan, sementara belum memenuhi aktivitas pengendalian karena masih lemahnya pengelolaan kas dan penerapan basis akrual belum memadai sedangkan pemantauan di fenomena tersebut pimpinan kurang mereview dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan.

Selanjutnya terdapat fenomena yang terjadi pada PT Kereta Indonesia (persero) kota Bandung Pada Juli 2019 Menurut Vicky Winda Junior Manager,

menyatakan salah satunya terkait rencana penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) belum disusun secara cermat dan belum ada koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Hal tersebut merupakan lemahnya sistem pengendalian internal dari segi aktivitas pengendalian internal dikarenakan tidak dilakukannya inventarisasi fisik mengenai dana tersebut. Kemudian, PT Kereta Api Properti Manajemen (KAPM) yang ditunjuk langsung sebagai kontraktor utama, mengalihkan seluruh pekerjaan kepada subkontraktor tanpa melalui prosedur pemilihan, dan subkontraktor menargetkan keuntungan yang melebihi kewajiban. Ini menyebabkan kelebihan pembayaran. Hal tersebut merupakan lemahnya sistem pengendalian internal dari segi penilaian risiko, karena pihak manajemen tidak memirakan kembali atas keputusannya dalam mengalihkan semua pekerjaannya kepada pihak lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu *et.,al* (2016) mengungkapkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan koefisien variabel sistem pengendalian intern. Semakin tinggi penerapan sistem pengendalian intern, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Implementasi *Good Corporate Governance*, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi Kasus pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kota Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Suatu perincian masalah agar dapat dengan jelas diketahui, dimana uraiannya berisi mengenai permasalahan secara rinci atau pelanggaran – pelanggaran yang telah dilakukan atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan kebijakan yang ditentukan atau ditetapkan, maka identifikasi masalah harus disertakan dengan data dan bukti pendukung (Juliansyah Noor, 2011:28). Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka peneliti mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Penyajian laporan keuangan yang tidak relevan, tidak andal, tidak dapat dibandingkan dan tidak dapat dipahami.
2. *Good Corporate Governance* belum berjalan dengan baik.
3. Lemahnya lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian dan kurangnya pemantauan dalam sistem pengendalian internal.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu jenis pertanyaan yang bisa menjadi acuan bagi peneliti guna menghimpun berbagai data dan informasi di lapangan, pada saat mengatur susunan suatu rumusan masalah perlu mencermati metode perumusan masalah agar jika dilakukan pengujian penelitian tidak mengalami resiko besarnya kesalahan bahkan terjadi kegagalan (Sugiyono, 2017:35). Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan

2. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah sebagai cara pencarian kebenaran aktualitas atas pengaruh kinerja keuangan dan struktur modal terhadap harga saham dengan memanfaatkan data empiris, yang berfungsi sebagai penyelesaian masalah (Soerjono, 2010:56).

Sesuai dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data dari responden dan memperoleh pemahaman mengenai Pengaruh Implementasi *Good Corporate Governance* dan Sistem pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD Provinsi Jawa Barat.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis diatas, maka tujuan penelitaian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa pengaruh *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan
2. Untuk mengetahui seberapa pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Manfaat atau kegunaan praktis dari penelitian yang dilakukan ialah sebagai pemecahan masalah dan penambahan pengetahuan serta ilmu pada bidang yang dikaji, agar dapat memberikan jalan keluar untuk berbagai permasalahan yang telah dan akan terjadi bagi unit analisis penelitian (Umi Narimawati, 2010:10).

Berdasarkan pengertian diatas, hasil ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan kepada perusahaan atau instansi sehingga dapat meningkatkan, menjaga kualitas penambahan masukan mengenai hal tersebut.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis adalah berguna untuk penambahan wawasan ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat sebagai acuan data dan informasi dalam perluasan penelitian yang lebih baik lagi dan sebagai pembanding bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil subjek serta objek serupa (Umi Narimawati, 2010:11). Adapun kegunaan akademis yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis peneliti dapat dijadikan sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman dalam pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh secara teori dilapangan.

2. Bagi peneliti lain diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini.
3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu karya penelitian yang baru dalam pengembangan kualitas laporan keuangan.